

## **BAB IV**

### **DINAMIKA PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA**

#### **4.1 Pembangunan Perikanan Berkelanjutan Indonesia**

Sumber daya ikan memiliki arti penting bagi Indonesia. Selain untuk pakan sehari-hari masyarakat, ikan merupakan komoditas unggulan ekspor dan lapangan pekerjaan masyarakat sehingga ikan akan dibutuhkan sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri generasi sekarang dan selanjutnya, dibutuhkannya prinsip keberlanjutan agar industri perikanan tetap bertahan. Sebagai anggota PBB, Indonesia diwajibkan untuk mendukung agenda 2030 PBB yaitu pembangunan berkelanjutan di setiap sektor termasuk sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Indonesia sendiri mendukung penuh prinsip berkelanjutan ini yang dibuktikan dari kebijakan-kebijakan untuk mengatur jenis alat tangkap yang berkelanjutan dan menangani kegiatan penangkapan maupun budidaya yang tidak berkelanjutan. Namun, faktanya masih terjadi masalah-masalah terkait pembangunan perikanan berkelanjutan yang dapat dikatanya refleksi dari kurangnya pengawasan pemerintah dan edukasi atau sosialisasi masyarakat atas konsep tersebut. Selain itu juga, banyak masyarakat yang bergantung hidup dalam produksi ikan sehingga cenderung hanya memikirkan secara ekonomis dan efisiensi waktu.

Selain masalah domestik, mutu ikan Indonesia menjadi tantangan untuk memasuki pasar global. Ikan merupakan pakan dunia sehingga negara-negara berusaha untuk membangun perikanan yang mengingat bahwa setiap negara memiliki kapasitas penyediaan yang berbeda-beda. Mutu ikan sangat dipengaruhi oleh pakan tetapi Indonesia belum sanggup memproduksi pakan gizi seimbang sehingga perlu mengimpornya dengan harga yang relatif terus naik. Masalah tersebut memang sulit untuk dihindari tetapi Indonesia telah menetapkan kebijakan atas Pembangunan

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perikanan berkelanjutan melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pasal 6 ayat 1 oleh karena itu setiap sektor produksi ikan, tangkap dan budidaya, harus menjalankan prinsip tersebut.

#### **4.1.1 Industri Perikanan Indonesia**

Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam laut yang luar biasa yang tercermin dari Indonesia sebagai negara *Mega Marine Biodiversity* terbesar di dunia. Laut Indonesia digunakan untuk pariwisata, tempat cadangan minyak, tempat cekungan migas, dan industri perikanan (Poerwadi, 2017). Dalam industri perikanan meliputi segala proses mulai dari pengelolaan dan pemanfaatan baik sumber daya yang dalam hal ini adalah kekayaan ikan maupun lingkungannya. Proses tersebut mencakup semua proses bisnis perikanan yaitu pra produksi, penangkapan atau budidaya, pengelolaan, serta pemasaran (Bappenas, 2016). Tujuan dari industrialisasi kelautan dan perikanan sendiri tertulis dalam Permen KP No. PER.27/MEN/2012 yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, produktivitas kegiatan, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan pelaksanaan sesuai prinsip tertentu.

Prinsip-prinsip industrialisasi kelautan dan perikanan (Bappenas, 2016):

1. Meningkatkan nilai tambah
2. Modernisasi sistem produksi
3. Penguatan pelaku industri kelautan perikanan
4. Berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan
5. Berkelanjutan
6. Transformasi sosial

Prinsip tersebut menjelaskan pelaksanaan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan sehingga nilai jual meningkat

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dan memenuhi kebutuhan domestik, efisiensi dan modernisasi teknologi dalam produksi hulu ke hilir, penguatan pelaku industri melalui pembinaan hubungan antar entitas bisnis yang memiliki kepentingan dalam rantai nilai industri kelautan perikanan. Pengelolaan difokuskan terhadap komoditas unggulan dari wilayah tempat industri dilaksanakan secara berkelanjutan. (Bappenas, 2016)

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, PP No. 14 Tahun 2015, Industri pangan, dimana didalamnya termasuk industri pengolahan ikan merupakan salah satu dari 10 industri prioritas kementerian perindustrian. Dalam implementasinya, industri pengolahan perikanan sangat bergantung pada industri hulu perikanan sebagai bahan baku industri pengolahan perikanan, sehingga keterkaitan dari hulu ke hilir merupakan hal penting dalam pengembangan industri perikanan di Indonesia.

Potensi sumber daya laut Indonesia yang besar sampai saat ini belum diikuti dengan penguatan industrialisasi kelautan dan perikanan, hal ini dilihat dari nilai ekspor komoditas perikanan yang masih didominasi oleh ekspor ikan tanpa pengolahan baik hidup maupun beku dibandingkan dengan produk olahan perikanan. Secara keseluruhan, nilai ekspor komoditas perikanan sampai dengan triwulan I 2020 menunjukkan peningkatan tetapi masih relatif kecil dibandingkan total ekspor industri manufaktur, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan perikanan. Saat ini kendala utama dalam industri pengolahan perikanan adalah jaminan ketersediaan bahan baku (baik kuantitas maupun kualitas bahan baku), jaminan kualitas hasil olahan, pemanfaatan teknologi pengolahan ikan dan pemasaran.

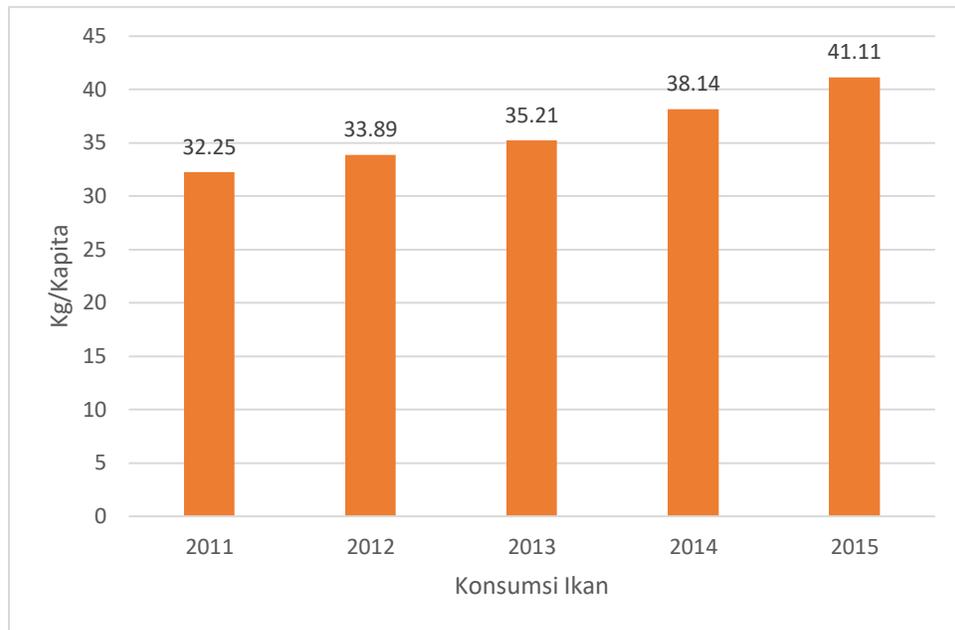
Pada dasarnya, produksi ikan akan memengaruhi tingkat konsumsi ikan. Semakin tinggi produksi ikan menandakan semakin besarnya kapasitas negara memenuhi kebutuhan sehingga stok tidak langka dan menjamin kemudahan akses beli.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Grafik 3 : Konsumsi Ikan Dalam Negeri Indonesia tahun 2011-2015



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016

Grafik tersebut menjelaskan bahwa selama 2011-2015 terjadi peningkatan konsumsi ikan di Indonesia. Selama lima tahun, konsumsi ikan mengalami peningkatan hampir 6,3 persen dan sudah melewati target untuk konsumsi tahun 2015 dimana target yang ditentukan adalah 40,90kg/kap/tahun sedangkan hasil yang didapat mencapai 41,11 kg/kap/tahun (KKPnews, 2016). Grafik tersebut juga menjadi bukti bahwa ikan terus diminati dan menjadi komoditas penting setiap tahunnya. KKP menyatakan bahwa peningkatan terjadi didukung oleh sosialisasi yang baik tentang konsumsi ikan melalui kampanye dan kegiatan terkait gemar makan ikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, opini masyarakat telah terbentuk ikan sebagai pakan sehari-hari dengan gizi tinggi dan menyebabkan perdagangan ikan domestik meningkat dan keuntungan bagi pembisnis ikan turut meningkat.

Semakin banyaknya promosi konsumsi ikan menjadikan ikan sebagai komoditas penting untuk pakan masyarakat dunia. Industri perikanan

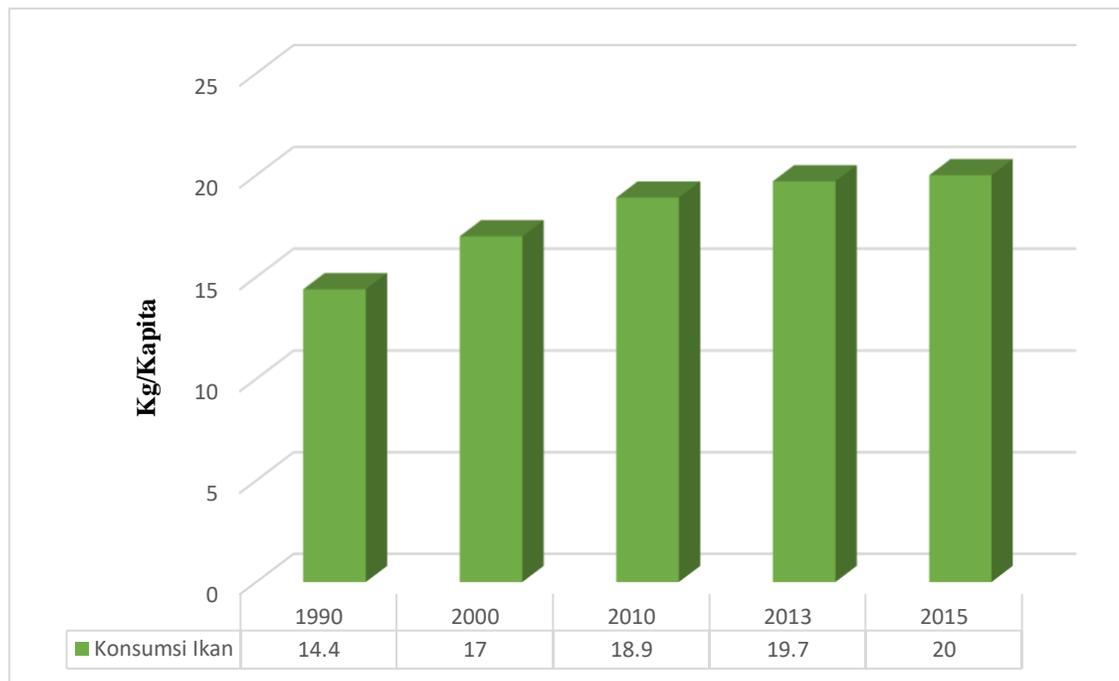
Dessy Natalia, 2020

*IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

difokuskan sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah atau negara sehingga jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi bervariasi kembali lagi disesuaikan oleh kemampuan penyediaan stok ikan oleh wilayah bersangkutan. Menurut FAO, pola konsumsi ikan di tiap wilayah akan berubah dengan faktor pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan standar hidup, serta kesempatan perdagangan dan perubahan distribusi pangan. Faktor tersebut akan terus terjadi setiap tahunnya mengikuti mobilitas manusia sehingga ikan selalu dibutuhkan setiap tahunnya.

Grafik 4 : Konsumsi Ikan Global (Kilogram per kapita)



Sumber : FAO, State of World Fisheries and Aquaculture 2012,2014, dan 2016

Dilihat dari level global, grafik tersebut menjelaskan konsumsi ikan terus meningkat. Ikan sudah menjadi pakan dunia dari tahun 1990 bahkan sebelumnya dan angka konsumsi semakin meningkat menandakan bahwa ikan

Dessy Natalia, 2020  
**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**  
 UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

masih dibutuhkan dari dahulu sampai sekarang oleh karena itu dibutuhkannya pelaksanaan secara berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan ikan dunia. Angka dari tahun 2010-2015 stabil diatas 18kg/kap/tahun namun tetap diikuti oleh peningkatan walaupun tidak memberikan perbedaan yang cukup besar. Ikan masih menjadi komoditas penting masyarakat global dimana tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan ikan domestiknya mengikuti bagaimana potensi wilayah sehingga dibutuhkannya impor untuk memenuhi kebutuhan akan ikan. Dari hal tersebut terlihat bahwa adanya potensi ikan Indonesia dalam memeriahkan pasar global mengingat potensi stok ikan Indonesia yang cukup membanggakan.

Sebagai pakan dunia, mutu ikan harus diperhatikan karena menjadi sumber energi dan menjamin kesehatan manusia. Mutu pangan merupakan nilai yang diperuntukkan untuk bahan makanan dan minuman yang diolah maupun tidak diolah yang ditentukan oleh kandungan gizi, keamanan pangan, dan standar perdagangan (Kanza & Umar, 2015). Di Indonesia sendiri, standar mutu produk telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dimana setidaknya : (1) memenuhi kriteria keamanan hasil perikanan; (2) memiliki kandungan gizi yang baik untuk produk pengolahan ikan; (3) memenuhi standar perdagangan nasional untuk produk pengolahan ikan yang beredar di dalam negeri; dan (4) memenuhi standar negara tujuan ekspor atau standar internasional untuk produk pengolahan ikan yang akan diekspor. Mutu juga memengaruhi bagaimana nilai produk ikan di pasar global sehingga dibutuhkannya kegiatan dengan tujuan meningkatkan mutu ikan Indonesia. Semakin tingginya mutu ikan, maka nilai produk semakin tinggi sehingga pembisnis mendapatkan untung yang lebih banyak.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pemintaan ikan yang terus meningkat dilihat dari konsumsi ikan global harus diikuti potensi stok ikan sendiri. Tingkat konsumsi ikan domestik Indonesia cukup tinggi sehingga stok ikan Indonesia harus ditingkatkan untuk menembus pasar global secara masif. Dalam pelaksanaan menjaga stok ikan untuk pasar domestik dan internasional, lingkungan harus tetap diperhatikan yaitu dengan konsep berkelanjutan agar dapat dilakukan secara terus-menerus oleh generasi selanjutnya.

#### **4.1.2 Perikanan Berkelanjutan Indonesia**

Lingkungan merupakan isu yang telah menjadi agenda penting tiap negara. Masalah-masalah lingkungan yang terus terjadi mengakibatkan merosotnya kemampuan bumi untuk menyangga kehidupan. Hal ini membuat masyarakat cemas dan menimbulkan kesadaran bahwa manusia harus turun tangan dalam penjagaan bumi ini. Konsep Pembangunan berkelanjutan diinisiasi untuk untuk menekan permasalahan ini. PBB sendiri telah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda 2030 dengan tujuan menyelesaikan kemiskinan. Terdapat 17 target pembangunan berkelanjutan yang mencakup segala sektor pembangunan semua target tersebut berbaur hingga menjadi kesatuan utuh dimana suatu tindakan yang dilakukan untuk satu sektor berpengaruh ke sektor lainnya (UNDP, 2015). Pada tahun 2002, diadakan *The World Summit on Sustainable Development* (WSSD) yang menghasilkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman bagi setiap negara anggota. Dalam pelaksanaannya harus memastikan keseimbangan antara pembangunan, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan dan setiap negara harus menegaskan kebutuhan domestiknya sesuai dengan pedoman tersebut. (UN, 2002)

Industri sendiri tercangkup dalam target nomor 9 yaitu Infrastruktur, Industri, dan Inovasi. Sebagai salah satu sektor pembangunan,

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perlu digunakannya sistem kerja yang merefleksikan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan perikanan berkelanjutan. Menurut Ray Hilborn dari *University of Washington School of Aquatic and Fishery Sciences*, mendefinisikan perikanan berkelanjutan dengan segala aktivitas perikanan yang dapat menjamin keberlangsungan hasil produksi dalam jangka panjang, memelihara sistem biologi, sosial, dan ekonomi, serta menjaga keseimbangan lingkungan antar generasi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan manusia dan keberlangsungan alam tempat tinggalnya (Hilborn, Quinn, Schindler, & Rogers, 2003). Sedangkan *Marine Stewardship Council* (MSC) menyatakan bahwa perikanan berkelanjutan atau *Sustainable Fishery* dilaksanakan dengan mempertimbangkan efek negatif yang mungkin hadir bagi lingkungan dan menyebabkan lingkungan tidak sehat lagi dan mengganggu keanekaragaman serta fungsi ekosistem, dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati negara atau wilayah yang bersangkutan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi selanjutnya. (Deere, 1999)

Dari kedua pendapat ahli bidang kelautan dan perikanan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas perikanan terus bertahan apabila adanya perhatian dari sisi lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar dapat menghasilkan produk terus menerus sehingga kebutuhan generasi sekarang dan masa depan dapat dipenuhi. Istilah *Sustainable Fishery* diinisiasi pada tahun 1995 dan telah dijadikan sebagai agenda dunia dan FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan melalui penerbitan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). FAO sendiri menyatakan bahwa tujuan dibuatnya kode etik tersebut untuk mengatur perilaku internasional dalam pelaksanaan kegiatan perikanan. Perilaku yang dimaksud adalah dilakukan dengan tanggung jawab dengan memastikan pengelolaan, konservasi, dan pengembangan sumber daya ikan yang efektif, serta berwawasan lingkungan

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

(FAO, 2018). Kode tersebut mengakui dan tetap berpegang pada kepentingan semua pemangku kepentingan industri perikanan dan harus tetap menghasilkan produk dengan nutrisi yang sesuai dengan standar. Ikan memang tergolong dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui tetapi bukan berarti dapat digunakan tanpa pengawasan. Hal tersebut akan menjadi alasan mengapa lingkungan rusak dan nantinya akan menyebabkan kepunahan spesies ikan itu sendiri. Oleh karena itu, perikanan berkelanjutan dilakukan agar penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan secara terus menerus tanpa mengurangi stok ikan untuk generasi mendatang. (Bapennas, 2014)

Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam stok perikanan serta dapat memberikan manfaat maksimal secara berkelanjutan apabila pengelolaan dilakukan secara lestari, optimal, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat memberikan kemakmuran kepada masyarakat terutama untuk nelayan dan pelaku usaha dan untuk masyarakat lainnya dapat memberikan manfaat seperti pemenuhan kebutuhan gizi (Bapennas, 2014). Selain itu perikanan berkelanjutan menjamin keberlangsungan usaha perikanan sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan menjadi mata pencaharian masyarakat dan kegiatan perdagangan ikan dapat meningkatkan ekspor dan menghasilkan devisa negara.

Inti utama dari konsep ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perikanan yang nantinya akan memberikan dampak positif di berbagai dimensi. Untuk mendapatkan manfaat tersebut secara maksimal untuk kemakmuran rakyat dan negara itu sendiri, negara harus mengarahkan pelaksanaan kegiatan sejalan dengan kaidah-kaidah tersebut secepatnya. Apabila kemakmuran rakyat terjadi secara merata, maka negara juga menjadi makmur seutuhnya.

Sama seperti dasar pembangunan berkelanjutan, pembangunan perikanan berkelanjutan memiliki tiga unsur yaitu ekonomi, sosial, dan

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

lingkungan. Ketiganya harus dijalankan secara beriringan dan disatupadukan agar mencapai tujuan yang diharapkan (Silalahi, 2003). *Pertama*, perikanan dikatakan berkelanjutan dari sisi ekonomi apabila sektor tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya secara finansial, dapat menghasilkan ikan secara berkelanjutan diartikan dapat memenuhi kebutuhan ikan untuk generasi sekarang dan masa depan, serta mampu menyumbangkan pajak dan devisa bagi negara secara signifikan. *Kedua*, secara sosial, perikanan berkelanjutan dikatakan berjalan apabila kebutuhan utama sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan seluruh masyarakat terpenuhi dan menghindari konflik sosial. Industri perikanan juga menjadi lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih merata dan pekerjaan sebagai usaha dalam kesetaraan gender. *Ketiga*, pembangunan perikanan dikatakan berkelanjutan dari sisi lingkungan yang dimaksud adalah tidak adanya eksploitasi yang melewati batas, pemeliharaan stok ikan secara stabil, dan pengolahan limbah agar tidak memberikan dampak lingkungan tercemar. (Bappenas, 2014)

Masalah baru akan muncul apabila ketiga unsur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Apabila sisi lingkungan tidak dilakukan secara berkelanjutan, seperti penggunaan teknologi penghancur atau bom peledak yang beralasan lebih cepat dan mendapatkan kuantitas stok ikan yang lebih banyak tetapi pada dasarnya hanya memikirkan keuntungan pribadi. Kegiatan tersebut dapat menghancurkan terumbu karang yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan laut serta mematikan spesies ikan bahkan sampai level kepunahan (Network, 2020). Apabila satu spesies punah, akan terjadi perubahan struktur ekosistem yang menyebabkan usaha perikanan tidak dapat bertahan. Para pembisnis usaha tidak dapat melanjutkan usahanya sehingga masyarakat yang bergantung hidup dengan usaha tersebut akan kehilangan

**Dessy Natalia, 2020**

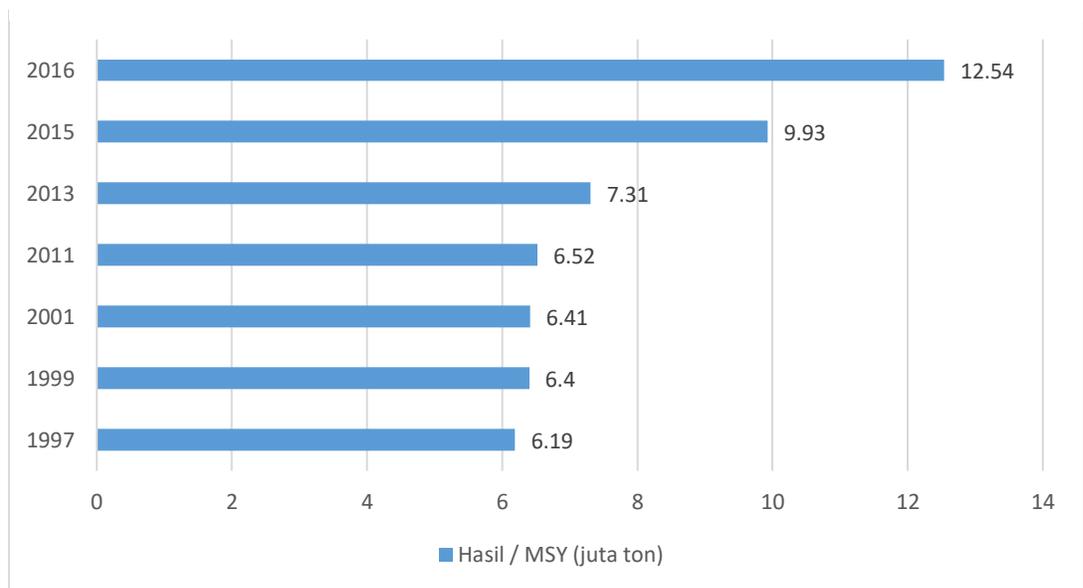
**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pekerjaan. Masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan utama sehingga akan mendorong kemungkinan angka kriminalitas meningkat.

Apabila dilihat dari sisi ekonomi, jika tidak dilakukan secara berkelanjutan seperti harga ikan yang terlalu rendah, akan mengakibatkan eksploitasi tenaga manusia dan stok ikan secara masif. Usaha perikanan harus menutupi biaya produksi yang diperoleh dari penjualan ikan. Jika harga terlalu kecil, maka upah pekerja dapat dipangkas dan penjualan atas eksploitasi ikan akan terus dilakukan sampai biaya tersebut dapat terpenuhi. Kembali lagi apabila eksploitasi yang melewati batas wajar dilakukan akan merusak lingkungan dan upah yang rendah akan membuat masyarakat kembali miskin namun pada dasarnya masyarakat bekerja untuk mengurangi angka kemiskinan. Dan yang terakhir, tanpa keberlanjutan kehidupan sosial para *stake holder* perikanan, maka kemungkinan konflik di masyarakat penggunaanya akan terjadi.

Grafik 5 :Stok Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (juta ton/tahun)



Sumber : Komisi Nasional Kajian Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2017

Grafik tersebut menjelaskan stok sumber daya ikan Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. KKP menyebutkan bahwa peningkatan tersebut terjadi akibat pelaksanaan peraturan atas penangkapan secara berkelanjutan dan kebijakan dalam penanganan *illegal fishing* yang mencangkup penggunaan alat tangkap yang tidak berkelanjutan dan penenggelaman kapal pencuri ikan (Prihandini, 2018). Kebijakan tersebut mengikuti arah pembangunan perikanan berkelanjutan dan langsung terlihat bahwa stok ikan mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia memiliki stok ikan yang unggul sehingga dibutuhkan konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan agar mendapatkan manfaat yang berguna dalam dimensi ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan tersendiri yaitu mewajibkan pelaksanaan pengelolaan ikan yang memiliki tujuan tercapainya manfaat optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan yang diamanatkan secara resmi melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan pasal 6 ayat 1. Namun, faktanya masih ditemukan kegiatan yang belum sesuai dengan kaidah pembangunan perikanan berkelanjutan dan hambatan yang menjadikan pembangunan perikanan berkelanjutan belum berjalan secara optimal.

#### **4.1.3 Kinerja Perikanan Tangkap**

Aktivitas perikanan tangkap sangatlah berhubungan langsung dengan alam laut oleh karena itu dibutuhkan pengawasan serta edukasi atas perikanan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri kinerja industri perikanan tangkap belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan cenderung hanya memikirkan sisi ekonomisnya saja sedangkan sesuai dengan arahan

Dessy Natalia, 2020

*IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pemerintah, sektor perikanan Indonesia harus didasari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi Ekonomi, Perikanan tangkap Indonesia masih memiliki peran yang lebih dominan dalam pembangunan industri perikanan. Dapat dilihat dari nilai produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 yang mencapai Rp 79,4 triliun yang diperoleh dari tangkapan laut Indonesia maupun perairan umum. Jumlah tangkapan dari laut Indonesia sendiri mencapai 5,44 juta ton serta 0,34 juta ton dari perairan umum (Bappenas, 2014). Namun, semakin tinggi angka tangkapan ikan Indonesia, semakin banyak permasalahan yang dihadapi terkait prinsip berkelanjutan.

Jumlah stok ikan Indonesia sendiri mengalami penurunan akibat penangkapan tidak berkelanjutan sehingga produktivitasnya juga menurun. Pada dasarnya hal ini didorong oleh penangkapan berlebih di beberapa wilayah dimana pelakunya tidak hanya dari luar negeri tetapi dari kapal nasional. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas sektor perikanan tahun 2011 yaitu 9,19 ton/tahun/kapal dan menurun ke angka 8,81 ton/tahun/kapal pada tahun 2012. Indonesia sendiri sudah berusaha untuk menekan tingkat kriminalitas kelautan dengan membuat kebijakan terkait penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* tetapi masih tingginya angka kepatuhan. Masalah domestik yang paling marak terjadi adalah ketidakpatuhan melaporkan *logbook* hasil tangkapan serta penggunaan alat tangkapan yang bersifat destruktif atau bahan-bahan yang berbahaya. KKP sendiri menyatakan bahwa dampaknya terasa bagi ekonomi, seperti contoh, kerugian dari masalah IUU di Laut Arafura mencapai 40 triliun rupiah pertahunnya dan mencapai 520 triliun rupiah dari tahun 2001-2013. (Noviani, 2013)

Kerugian tersebut berasal dari satu lautan Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami kerugian yang signifikan apabila dihitung dari semua kasus IUU. Selain untuk nilai ekonomi, hal tersebut relatif memberikan

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dampak negatif bagi lingkungan dan akan memengaruhi perekonomian warga serta tingkat kemiskinan. Upah nelayan juga belum dapat dikatakan pendapatan layak. Bappenas menyatakan bahwa 60% nilai produksi merupakan biaya produksi dan 40% nya adalah pendapatan nelayan sehingga apabila dianalisis pendapatan nelayan pertahunnya mencapai Rp 12.679.276 per nelayan sehingga nelayan hanya berpenghasilan Rp 1.370.376 per bulan dan angka tersebut masih dibawah upah minimum regional (UMR) (Bappenas, 2014). Berdasarkan kajian diatas, dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perikanan Indonesia belum berkelanjutan.

Lokasi penangkapan ikan juga menjadi faktor mempengaruhi sosial berkelanjutan. Pada dasarnya, laut Indonesia sangatlah luas tetapi penangkapan ikan masih belum merata dalam artian masih terfokus pada perairan pantai Indonesia saja. Apabila terlalu banyak armada kapal yang menangkap di wilayah tersebut, Hal tersebut akan mempengaruhi seberapa banyak sumber daya alam yang tersedia. Kegiatan IUU masih kerap dilakukan di perairan pantai sehingga terjadinya kekosongan sumberdaya di perairan tersebut yang pada dasarnya merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir (Susilo, 2009). Hal ini terjadi utamanya di pantai padat penduduk seperti Pantai Utara Jawa dan Pantai Timur Sumatera. Apabila konsentrasi nelayan-nelayan hanya di perairan pantai, maka stok ikan akan berkurang dan tidak berkelanjutan.

Kegiatan IUU akan menimbulkan konflik sosial antara masyarakat pesisir pantai dengan nelayan karena keduanya membutuhkan stok tersebut untuk menyambung hidup ditambah belum adanya peraturan khusus yang dibuat untuk mengatur jumlah ikan yang boleh ditangkap. Selain itu masih terjadinya pelaksanaan wewenang pemerintah daerah yang belum optimal terkait pembatasan jumlah tangkapan (Bappenas, 2014). Nelayan-nelayan yang terfokus dalam penangkapan ikan di perairan pantai dipengaruhi oleh aspek sarana seperti ukuran alat tangkap dan kapal. Apabila ini terus terjadi, masalah

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesenjangan antar nelayan akan meningkat dan konflik akan semakin runyam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan perikanan tangkap berkelanjutan dari sisi sosial masih memiliki kecacatan yang perlu menjadi agenda pemerintah.

Terakhir, yaitu sisi lingkungan, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani kasus atau menjaga stok sumber daya ikan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.45/MEN/2012, estimasi potensi produksi lestari (MSY) Indonesia mencapai 6,4 juta ton per tahun (Dahuri, 2010). Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, nelayan tidak diperbolehkan eksploitasi secara menyeluruh sehingga ditetapkan pembatasan penangkapan ikan yaitu sebesar 5,12 juta ton untuk tahun 2012. Keputusan ini diresmikan agar tidak rusaknya keseimbangan ekosistem laut akibat eksploitasi sehingga jumlah tangkapan ikan Indonesia tidak boleh melebihi angka tersebut. Jika tangkapan ikan pertahunnya melebihi 5,12 juta ton atau bahkan melewati MSY, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perikanan tangkap Indonesia tidak berkelanjutan. (Bapennas, 2014)

Batas penangkapan ikan memang terus meningkat tiap tahunnya mengikuti potensi ikan di laut. Tetapi apabila melihat kebijakan tahun 2012, batas penangkapan hanya 5,12 juta ton dan sesuai dengan angka dari Bapennas yang tertulis dalam kajian strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan, tingkat produksi perikanan tangkap lebih tinggi 0,23 yaitu 5,34 ton di tahun 2011 dan terus meningkat sampai tahun 2012 sebesar 0,32 juta ton dari jumlah yang ditentukan sehingga memperoleh nilai 5,44 juta ton (Bapennas, 2014). Hal ini membuktikan bahwa dari sisi lingkungan belum menerapkan sikap berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, tidak hanya pemerintah yang memperketat pengawasan, tetapi dibutuhkannya edukasi terhadap nelayan agar

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tidak melakukan penangkapan berlebihan yang merusak struktur ekosistem laut.

Dari penjelasan diatas yang mengikuti dimensi dasar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sektor perikanan tangkap dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sudah sadar akan pentingnya pengawasan terhadap lingkungan dan berusaha untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan tetapi masih ditemukan masalah-masalah yang didorong karena kurangnya optimalisasi pengawasan dan edukasi dari masyarakat.

#### **4.1.4 Kinerja Perikanan Budidaya**

Selain perikanan tangkap, sektor perikanan budidaya juga memiliki makna tersendiri untuk pembangunan perikanan Indonesia. Perikanan budi daya terus mengalami peningkatan di mulai tahun 2007 sampai sekarang. Menandakan semakin banyaknya masyarakat sebagai produsen budidaya ikan. Aktivitas budi daya dilakukan di air tawar atau air payau serta budi daya laut untuk rumput laut yang disesuaikan dengan jenis ikan yang dikelola (Supito, 2019). Walaupun aktivitas pengelolaan yang dilakukan di air tawar atau payau bersinggungan secara langsung dengan laut, masih dibutuhkannya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, seperti sektor perikanan tangkap, sektor perikanan budi daya masih mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Dari dimensi ekonomi, perikanan budidaya ikan dapat dikatakan dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dilansir dari data statistik KKP, tahun 2014, Rumah Tangga Produsen (RTP) budidaya air payau, tawar, dan laut mencapai 3.810.758 pembudidaya yang tersebar di Indonesia dan terus meningkat di tahun 2017 mencapai 4.130.735 pembudidaya yang tersebar di seluruh Indonesia (KKP, 2018). Hal ini membuktikan sangat banyak tenaga

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kerja yang bergantung pada perikanan budidaya. Walaupun hanya menjadi pekerjaan sampingan, budidaya ikan menjadi sumber pendapatan tertinggi bagi keluarga pembudidaya dengan memberikan 64% bahkan sampai 89% terhadap pendapatan mereka (Bappenas, 2014). Walaupun menjadi penyumbang pendapatan terbesar, rata-rata nilai pendapatan mencapai 14.500.000 atau sekitar 1.200.000 per bulannya dimana lagi-lagi angka tersebut dibawah UMR. Penyebab kecilnya nilai pendapatan yaitu untuk menutupi biaya produksi yang cenderung habis untuk pakan komoditas.

Pakan sendiri dapat mencapai 40% bahkan sampai 70% dari biaya produksi dan merupakan komponen biaya tertinggi dalam pelaksanaan budidaya (Bappenas, 2016). Pakan memiliki peran penting dalam penentuan kualitas komoditas yang nantinya akan menentukan tingkat seberapa kompetitif komoditas tersebut. Harga pakan merupakan salah satu indikator pendukung pembangunan ikan berkelanjutan sehingga dibutuhkan pengendalian akan harga pakan yang digunakan. Apabila tidak dilakukan pengendalian, maka akan merugikan pembudidaya dan pekerjanya dan tujuan untuk mengurangi kemiskinan tidak bisa tercapai.

Biaya besar pakan tersebut disebabkan ketidakmampuan Indonesia dalam produksi pakan dengan nutrisi cukup secara mandiri sehingga harus mengimpor pakan dari luar. Pada umumnya, bahan yang diimpor adalah tepung jagung, tepung kedelai, dan tepung ikan. Bahan tersebut sebenarnya dapat diperoleh di Indonesia, tetapi harganya lebih mahal dan tidak diimbangi dengan mutu yang seharusnya (Bappenas, 2014). Tepung ikan yang merupakan sumber nutrisi bagi ikan terus mengalami kenaikan harga diakibatkan oleh permintaan yang tinggi tetapi produsen tepung ikan yang sesuai dengan standar mutu hanya sedikit. Perikanan sudah menjadi pakan global sehingga negara berusaha untuk meningkatkan perikanan domestik masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhan ikan domestik maupun menembus pasar global. Apabila ikan

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Indonesia tidak memenuhi pakan yang sesuai dengan standar, ikan Indonesia tidak bisa bersaing di pasar global sehingga bisnis tersebut tidak dapat bertahan. Sehingga dari sisi ekonomi, pembangunan perikanan berkelanjutan belum berhasil karena belum memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Selanjutnya dari sisi sosial, sebagai mana dikatakan di atas bahwa budidaya ikan merupakan pekerjaan sampingan masyarakat sehingga skalanya masih kecil. Untuk meningkatkan tingkat produktivitas perindustrian tersebut, perlu ditingkatkannya penggunaan teknologi diimbangi dengan transisi perilaku budidaya atau kemampuan tenaga kerja dalam menguasai teknologi tersebut. Transisi tersebut memerlukan kesiapan mental dan modal. Teknologi pada dasarnya sangat membantu pelaksanaan budidaya secara optimal terutama waktu dan tingkatan yang memerlukan kedetailan tinggi sehingga budidaya lebih produktif (Sukadi, 2002). Komponen pakan, benih dan obat-obatan merupakan komponen yang cukup besar proporsinya pada biaya produksi keseluruhan dan mempunyai laju peningkatan indeks harga yang terbesar dari komponen lainnya serta akan menjadi pertimbangan ketika sistem budidaya diubah (Bapennas, 2014). Hal tersebut dapat menimbulkan *double impact* pada kebutuhan biaya produksi sehingga dibutuhkannya persiapan yang terstruktur untuk menekan terjadinya konflik sosial.

Terakhir, dari sudut pandang lingkungan, masalah dapat disebabkan oleh pakan ikan. Pada dasarnya, budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh air yang merupakan medan budidaya, kualitas pakan, dan kualitas benih (Panggabean, Sasanti, & Yulisman, 2017). Selama budidaya, pakan dilakukan didalam air sehingga sampah dari pakan yang tertinggal didalam air yang berlebih akan mencemarkan air. Sisaan pakan yang mengendap di air tawar adalah fosfor dan untuk air laut adalah senyawa nitrogen (Bapennas, 2014). Oleh karena itu butuhnya pengawasan dalam memproduksi ikan budidaya karena apabila

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dilakukan budidaya secara masif, sisaan pakan akan merusak lahan budidaya itu sendiri.

Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai pembangunan ikan berkelanjutan tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Dibutuhkannya program untuk mengenal dan memperdalam model industri yang inklusif dan berkelanjutan dengan harapan untuk memperbaiki keseimbangan ekonomi, sosial, serta lingkungan Indonesia.

#### **4.2 *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan Sustainable Market Access through Responsible of Trading Fish in Indonesia (SMART-Fish Indonesia)***

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia dan UNIDO menyusun program SMART-Fish (*Sustainable Market Access through Responsible of Trading Fish in Indonesia*) sesuai dengan prinsip perikanan berkelanjutan. Kerjasama antara kedua pihak didasari oleh kepentingan masing-masing, UNIDO memiliki tugas untuk mempromosikan industri yang inklusif berkelanjutan dan Indonesia memiliki kapasitas yang baik dalam sektor perikanan tetapi masih menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan prinsip berkelanjutan dan tingkat daya saing. Dilihat dari kepentingan keduanya, kedua pihak memiliki hubungan resmi dengan PBB, sesuai identitasnya UNIDO dan Indonesia wajib ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerjasama tersebut, secara dominan terlihat bahwa apabila program berjalan sesuai harapan, Indonesia yang akan mendapatkan keuntungan terutama dalam produktivitas industri perikanan tetapi disisi lain UNIDO juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh adalah kepercayaan negara-negara atas UNIDO sebagai organisasi yang efektif dalam usaha industri inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya program SMART-Fish memiliki arti penting keduanya pihak.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

### 4.3.1 *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*

*United Nations Industrial Development Organization* atau UNIDO merupakan badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak dalam bidang industri. Badan tersebut memiliki tujuan sebagai upaya mencapai agenda PBB 2030 yaitu pembangunan berkelanjutan melalui promosi pengembangan industri untuk mengurangi kemiskinan, globalisasi yang inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan (UNIDO, 2019). UNIDO didirikan tahun 1985 dan sampai tahun 2019, UNIDO memiliki 170 negara anggota di seluruh dunia.

UNIDO sebagai badan khusus PBB dimandatkan untuk mencapai tujuan berkelanjutan, target 9, yang berhubungan dengan industri dengan tugas (UNIDO, 2019) :

1. UNIDO berupaya memajukan pengentasan kemiskinan dan inklusivitas, membangun kapasitas produktif secara inklusif, dan memberikan lebih banyak peluang bagi semua perempuan dan laki-laki maupun lintas kelompok sosial, juga melalui kemitraan dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam *value chain*.
2. UNIDO mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri yang cepat, meningkatkan kapasitas perdagangan industri, dan memastikan bahwa semua negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan kemajuan teknologi, serta penerapan kebijakan industri modern dan kepatuhan terhadap norma dan standar internasional.
3. UNIDO bertujuan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, membangun kemasyarakatan kelembagaan untuk industri penghijauan melalui teknologi produksi yang lebih bersih dan

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

metodologi sumber daya yang efisien, dan menciptakan industri hijau, didorong oleh fasilitasi teknologi, inovasi dan pembangunan kemitraan

Badan khusus ini terlibat dalam pengurangan kemiskinan melalui kegiatan produktif, meningkatkan kapasitas perdagangan dan mengintegrasikan negara-negara berkembang dalam perdagangan global, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan. Hal tersebut merupakan maksud dari realisasi dunia dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang merupakan visi UNIDO dibentuk. Selama pelaksanaan tugasnya, UNIDO juga turut aktif untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa badan tersebut efektif dalam pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan memperbaiki sumber keuangan dalam pelaksanaan program. Misi UNIDO sendiri yaitu pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kemiskinan bagi semua negara karena setiap negara memiliki hak untuk berkembang dan menumbuhkan sektor industri domestiknya. Pertumbuhan industri tersebut untuk mendukung partisipasi negara dalam pasar global serta untuk melindungi lingkungan. (UNIDO, 2019)

Industri inklusif dan berkelanjutan memiliki tiga aspek sebagaimana dasar dari pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program Organisasi yang disepakati terstruktur dalam tiga bidang kegiatan utama, yang masing-masing mewakili setiap aspek dari ISID: menciptakan kemakmuran bersama, memajukan daya saing ekonomi, menjaga daya saing lingkungan, dan memperkuat pengetahuan serta institusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai empat prinsip utama industri inklusif dan berkelanjutan (UNIDO, 2015) :

1. Tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan manfaat dari pertumbuhan industri, dan kemakmuran berhak dirasakan setiap

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bagian masyarakat di semua negara karena industri menciptakan kekayaan atau keuntungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kritis dan kebutuhan sosial.

2. Setiap negara mampu mencapai tingkat industrialisasi yang lebih tinggi di ekonomi mereka, dan mendapat manfaat dari globalisasi pasar untuk barang dan jasa industri.
3. Kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih luas didukung dalam kerangka kerja yang berwawasan lingkungan.
4. Pengetahuan dan sumber daya tertentu dari semua aktor pembangunan terkait digabungkan untuk memaksimalkan manfaat pembangunan ISID.

Selain untuk merangsang produktivitas industri domestik negara, UNIDO juga berusaha membuka jalan bagi industri untuk memeriahkan pasar global. Permasalahan utama produk negara tidak dapat menarik perhatian pasar global adalah kualitas produk yang dibawah standar sehingga dibutuhkannya usaha dalam meningkatkan mutu agar daya saing produk meningkat. UNIDO sendiri menyatakan bahwa syarat utama untuk meningkatkan daya saing industri serta pangsa pasar ekspor barang dan jasa adalah barang dan jasa yang andal, kompetitif, aman, dan hemat biaya (UNIDO, 2019). Oleh karena itu, industri membutuhkan informasi pasar berkelanjutan, keterampilan, restrukturisasi, serta memperbaiki faktor yang menjadi pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan keseluruhan dari kerangka yang dipromosikan oleh UNIDO adalah untuk memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi untuk meningkatkan produktivitas mereka sehingga mereka dapat bersaing di pasar global dan mendapatkan manfaat dari peluang perdagangan yang disajikan kepada mereka di bawah sistem perdagangan terbuka.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia dan UNIDO melakukan kerjasama di mulai dari tahun 1967 dan melalui beberapa proyek, bantuan UNIDO sudah banyak diterima oleh Indonesia terutama melalui kegiatan proyek kerjasama teknis. Proyek yang dilakukan pada umumnya memberikan manfaat peningkatan kemampuan teknologi industri, peningkatan kualitas lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Pada tahun 2007, dilakukannya penandatanganan *memorandum of understanding* tentang *Pembentukan Regional Center for South-South Industrial Cooperation (RCSSIC)* di Jakarta oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama industri selatan-selatan atau negara-negara berkembang. Posisi Indonesia dalam RCSSIC difokuskan dalam sektor agroindustri untuk memberi bantuan teknis kepada negara kurang berkembang seperti Afrika. Dalam kerjasama ini, UNIDO melihat bahwa Indonesia memiliki kapasitas dalam perkembangan sektor agroindustri sehingga Indonesia diberikan kepercayaan untuk ambil bagian dalam RCSSIC. Siaran Pers Kemenperin menyatakan bahwa adanya harapan agar UNIDO dapat meningkatkan bantuan teknisnya untuk industri Indonesia dengan prioritas mengembangkan energi alternatif dan efisien, penjagaan lingkungan, dan mengentaskan kemiskinan (Kemenperin, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan dari kedua pihak untuk memperdalam kerjasama yang terdorong dari kerjasama RCSSIC tersebut yang telah mencapai harapan masing-masing pihak.

Indonesia memiliki laut dengan kekayaan sumber daya di dalamnya menjadikan Indonesia memiliki kapasitas dalam sektor perikanan. Kedua pihak melihat bahwa Indonesia sektor perikanan Indonesia masih belum optimal, dapat dilihat daya saing produk ikan Indonesia lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh UNIDO bahwa syarat meningkatkan daya saing adalah barang dan jasa yang andal, kompetitif, aman, dan hemat biaya, Indonesia masih belum

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

bisa efektifkan biaya terutama dalam pakan ikan. Pakan sangat memengaruhi kualitas daging ikan tetapi pakan tersebut harus diimpor karena Indonesia belum sanggup membuat pakan dengan nutrisi yang cukup secara mandiri (KKP, 2019). Selain itu, manajemen perikanan yang masih buruk serta merugikan Indonesia seperti contoh hilang dan terbuangnya 40% hasil selama proses penangkapan sampai siap konsumsi. Masalah ini sangat tidak berkelanjutan dan beberapa faktor penyebab memengaruhinya. Ikan merupakan pakan yang mudah rusak, sedangkan untuk membawanya ke pasar lokal maupun internasional memerlukan waktu yang lama (Nurhasan, 2019). Hal ini menyangkut pembangunan infrastruktur yang memengaruhi kemudahan alokasi ikan sehingga dibutuhkan pengetahuan dan praktik yang baik dalam penyimpanan dan pemindahan produk ikan.

Permasalahan yang dihadapi menjadikan Indonesia sebagai mitra yang cocok dengan tujuan dari UNIDO berdiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan industri perikanan Indonesia sesuai dengan strategi Pembangunan Berkelanjutan yaitu pengembangan industri yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia menyepakati kerjasama program *Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish in Indonesia* (SMART-Fish) dengan tiga komoditas utama ikan patin, ikan tuna, dan rumput laut budaya maupun tangkap langsung.

#### **4.3.2 *Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish in Indonesia* (SMART-Fish)**

*Sustainable Market Access through Responsible Trading of Fish in Indonesia* atau SMART-Fish merupakan program lima tahunan sektor industri perikanan dalam rangka peningkatan kapasitas ekspor produk-produk perikanan unggulan. Program ini dilaksanakan oleh UNIDO dan Kementerian Kelautan

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dan Perikanan yang dibiayai melalui hibah dari Pemerintah Swiss melalui *Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO)* (UNIDO, 2014). SMART-Fish periode pertama dilaksanakan dari tahun 2014-2019 dan diperpanjang sampai tahun 2022 dalam acara penandatanganan perpanjangan *Project Document Programme SMART-Fish* (KKP, 2019).

Program ini menganut prinsip pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan disektor perikanan tangkap maupun budidaya. Program ini dilaksanakan dengan mengedepankan pemanfaatan potensi perikanan seutuhnya secara berkelanjutan untuk dipromosikan di pasaran global. SMART-Fish dilaksanakan sebagai upaya dalam memperkuat kapasitas ekspor dan perdagangan tiga *value chain* unggulan yaitu perikanan tuna atau cakalang dari *pole and line* (huhate), patin, dan rumput laut. Tiga komoditas tersebut dipilih sesuai dengan pertimbangan: (1) Keanekaragaman rantai nilai yang meliputi penangkapan dan budidaya termasuk rumput laut; (2) Dampak positif yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional melalui penerapan praktek-praktek yang berkelanjutan, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah dan wanita; (3) Potensi yang besar untuk dikembangkan secara luas melibatkan komunitas yang lebih besar di tempat-tempat lainnya di Indonesia; (4) Adanya efisiensi sumber daya dan potensi pengurangan limbah sepanjang rantai nilai.

Sistem indutri perikanan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan wilayahnya atau pengelolaan stok unggulan dari wilayah tersebut. SMART-Fish sendiri telah memilih lokasi pengelolaan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayah dalam menghasilkan ikan tuna, patin, dan rumput laut.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Gambar 1 : Peta Lokasi Program SMART-Fish



Sumber : Leaflet SMART-Fish Indonesia 2014

Menurut gambar tersebut, program ini tersebar di empat daerah yaitu Jambi, Jawa timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan komoditas yang dikelola disesuaikan dengan keadaan wilayah, seperti geografis Jambi yang memiliki lahan basah atau rawa (Putinur & Poernomo, 2019). Dalam Forum Inovasi Teknologi Akuakultur, ikan patin dinyatakan sebagai komoditas yang dapat tumbuh dengan baik serta cocok untuk dibudidayakan di lahan marginal seperti lahan gambut dan lahan basah. (Widodo, Akmal, & Syafrudin, 2010). Di Sulawesi Selatan sendiri, rumput laut telah dinobatkan sebagai komoditas unggulan dan sesuai dengan prinsip industri perikanan sehingga SMART-Fish dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut didorong oleh lokasi yang strategis untuk melakukan budidaya rumput laut jenis *Gracilaria* sp. dan ketersediaan lahan budidayanya mencapai 50.201 hektar. (Tangko, 2008)

Komoditas rumput laut *Eucheuma cottoni* cocok untuk dikembangkan di Jawa Timur karena perairan yang tenang, ekosistem terumbu karang yang

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

memadai, serta wilayah pantai yang landai. Kapasitas tersebut memacu perkembangan budidaya rumput laut mencapai 3.224,70 ton yang dilakukan di lahan budidaya sekitar 5.795 ha (Jailani, Herawati, & Semedi, 2015). Untuk ikan tuna sendiri, selalu menduduki lima komoditas ekspor tertinggi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Letak geografis NTT diapit oleh perairan luas yaitu Samudera Hindia, Laut Sawu, Laut Timor, dan Laut Flores yang diyakini sebagai ruaya ikan tuna (Uktolseja, 1998). NTT sangat diyakini memiliki kapasitas ekspor dan produk yang kompetitif tetapi kekayaan dari ikan tuna tersebut menjadikan NTT menjadi sasaran *illegal fishing* dan tangkapan tidak berkelanjutan (Gigentika, Nurani, Wisudo, & Haluan, 2017). Melihat dari data-data diatas, SMART-Fish sangat mendukung komoditas unggulan setiap wilayahnya dimana memang diantaranya telah mencetak kapasitas ekspor tetapi masih ada permasalahan terkait mutu serta edukasi dalam pengelolannya.

Walaupun memiliki kapasitas yang kuat dalam stok ikan, Indonesia masih harus menghadapi tantangan-tantangan dalam sektor perikanan yang mendukung program ini dilaksanakan antara lain (UNIDO, 2014) :

1. Sisi pasokan: Karakteristik ekspor perikanan Indonesia “volume tinggi-nilai rendah” perlu diubah menjadi “volume tinggi-nilai tinggi”. Hal ini menandakan daya saing produk masih rendah namun kondisi ini menunjukkan bahwa peluang untuk nilai tambah ekspor yang lebih besar melalui teknologi yang lebih baik, sertifikasi lingkungan yang berkelanjutan (*Eco-label*), peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta tersedianya layanan yang memadai untuk para pengusaha. Hal-hal ini belum sepenuhnya disadari oleh pemangku kepentingan.
2. Tingkat kebijakan: Perlunya mempersiapkan sebuah strategi pengembangan ekspor perikanan yang berkelanjutan.

Dessy Natalia, 2020

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3. Jaringan pasar: Masih perlunya dikembangkan kegiatan promosi perdagangan yang efektif untuk memperluas jaringan pasar dan pembeli di luar negeri.

Aktivitas untuk menghadapi tantangan tersebut telah menjadi dasar kerjasama lima tahunan antara UNIDO dan Indonesia. Program SMART-Fish sebagai usaha UNIDO dalam pembuktiannya sebagai organisasi yang efektif dalam peningkatan industri yang inklusif serta berkelanjutan. Permasalahan utama Indonesia adalah masalah aktivitas yang tidak berkelanjutan serta daya saing. Oleh karena itu, program dilaksanakan di wilayah sesuai dengan komoditas unggulannya untuk memastikan kuantitas serta kualitas yang akan dibawa ke arena global. Sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menjalankan kegiatan berkelanjutan didorong oleh identitas Indonesia sebagai anggota PBB. Segala bentuk kegiatan SMART-Fish sudah tersusun untuk mencapai peningkatan industri serta pembangunan nasional.

**Dessy Natalia, 2020**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTARA UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) DAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TARGET 9**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]